

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Budiono didefinisikan sebagai penjas atas faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan kenaikan output dalam kurun waktu tertentu atau jangka panjang dan melihat reaksi antar faktor tersebut yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi.¹ Sukirno menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi dapat berarti peningkatan segala aktivitas dalam suatu perekonomian yang berpengaruh pada penambahan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam masyarakat.² Kemampuan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi, faktor produksi yang meningkat baik dari segi kuantitas dan kualitasnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat pula. Peningkatan faktor produksi diikuti oleh peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan.

Arsyad pula menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan PDB dengan tidak memperhatikan apakah peningkatan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat penambahan jumlah penduduk, dan apakah terjadi perubahan pola ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau

¹ Boediono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 1982).

² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 9.

tidak.³ Dalam suatu makro ekonomi definisi dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yang pertama pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan bagaimana pencapaian suatu perekonomian negara atas perkembangan ekonomi dan penduduknya sudah dalam keadaan tingkat makmur yang tinggi. Yang kedua, disisi lain istilah pertumbuhan ekonomi dapat menunjukkan suatu permasalahan perekonomian dalam suatu negara dalam waktu jangka panjang.⁴

Adisasmita berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur dengan menggunakan PDB maupun PDRB.⁵ PDB merupakan alat ukur terbaik untuk melihat pertumbuhan ekonomi, Alam dalam bukunya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana terjadinya penambahan PDB dari suatu negara atau daerah tertentu.⁶ PDB merupakan produk yang dihasilkan dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik sendiri maupun orang asing di dalam negeri dalam suatu negara.⁷

Tingkat pertumbuhan Ekonomi dapat memperlihatkan presentase peningkatan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah

³ Lincolin Arsyad, *Pembangunan Ekonomi edisi kelima*, (yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 12.

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 443

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 4.

⁶ Alam, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 25

⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar....* hlm. 17.

sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.⁸ Pertumbuhan ekonomi tidak begitu saja bisa langsung terwujud dalam suatu negara, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik secara ekonomi, maupun nonekonomi. Para ahli ekonomi beranggapan bahwa faktor produksi paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain: ⁹

a) Faktor ekonomi

- 1) Sumber alam: Tanah, sebagaimana yang diaplikasikan pada ilmu ekonomi meliputi seluruh sumber alam, seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sejenisnya. Tanah atau sumber alam ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Negara yang kurang atau tidak memiliki sumber alam tidak akan dapat membangun perekonomiannya dengan cepat. Namun, pemilikan tanah atau sumber alam saja tidak cukup untuk menumbuhkan perekonomian suatu negara, harus adanya pengolahan yang tepat. Pada umumnya tanah atau sumber alam yang ada atau tersedia di negara berkembang sering terbengkalai karena keterbelakangan ekonomi dan langkanya faktor teknologi.¹⁰

⁸Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro ekonomi & Makroekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008).

⁹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan oleh D. Guritno edisi I cetakanke 10*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 67-77

¹⁰ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan...*, hlm. 77

- 2) Akumulasi Modal: Selain tanah, akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Ketika stok modal mengalami kenaikan untuk batas waktu tertentu, maka hal ini disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Nurkse menyebutkan bahwa pembentukan modal dapat terjadi ketika masyarakat tidak melakukan segala aktivitasnya saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mendesak saja, melainkan juga mengarahkan sebagiannya untuk pembuatan barang modal, peralatan dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, serta pabrik.¹¹ Sehingga di sini pembentukan modal dapat pula berarti melakukan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, serta pendapatan nasional.
- 3) Organisasi: Organisasi bersifat pelengkap terhadap modal, buruh, serta dapat meningkatkan suatu produktivitas. Organisator dalam perekonomian di sini ialah mereka yang melakukan banyak inovasi, dan juga pengambil risiko di antara berbagai ketidakpastian, yaitu pemerintah, bank, dan juga lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam memajukan perekonomian. Organisator ini menghasilkan pandangan yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di antara mereka ada yang menekankan peran organisator ini pada para wiraswastawan, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, maupun yang lainnya. Pasar yang kecil, kurangnya modal, tidak adanya

¹¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan...*, hlm. 78

kepemilikan swasta dan perjanjian, kurangnya buruh yang terlatih dan terdidik, tidak cukup tersedianya bahan mentah dan infrastruktur seperti pengangkutan dan tenaga, serta tingginya ketidakpastian menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan suatu negara akan organisator.

- 4) Kemajuan Teknologi: Kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru, dimana hal ini dapat meningkatkan produktivitas buruh, modal, serta faktor produksi yang lainnya. Kuznets menyatakan terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, investasi, inovasi, penyempurnaan, serta penyebarluasan penemuan yang pada umumnya dibarengi dengan penyempurnaan. Hal inilah yang sulit ditemukan pada negara-negara berkembang.
- 5) Pembagian kerja dan skala produksi: Smith menekankan arti penting pembagian kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembagian kerja dapat meningkatkan produksi buruh.¹² Mereka dapat lebih efisien dan menghemat waktu. Akan tetapi, hal ini juga bergantung pada luas pasar. Ketika pangsa pasar luas, maka produksi pun juga akan meningkat, yang akhirnya spesialisasi dan pembagian kerja akan ikut meluas, sehingga pertumbuhan ekonomi akan melesat pula.

¹² M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan...*, hlm. 79

Sempitnya pasar yang ada di negara-negara berkembang membuat pembagian kerja dan perluasan skala produksi dalam perekonomian pun belum sempurna.

b) Faktor non ekonomi

- 1) Faktor Sosial: Faktor sosial menciptakan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Terdapat beberapa hal yang kurang menunjang pertumbuhan ekonomi. Mereka masih kental akan kasta, marga, atau kepercayaan akan tingkatan sosial. Pandangan demikianlah yang terkadang menjadi jurang pemisah dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat harus memiliki pandangan yang luas, sehingga terdapat sinergi yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya.
- 2) Faktor manusia: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan pengembangan faktor manusia, sebagaimana yang terlihat dalam efisiensi atau produktivitas di kalangan tenaga buruh. Hal ini juga disebut sebagai pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang tumbuh secara cepat juga akan menghambat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Pendapatan per kapita dan pembentukan modal yang rendah akan mempersulit negara-negara berkembang untuk menopang tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut.

3) Faktor Politik dan administratif: Struktur politik dan administratif membutuhkan administratif yang kuat, efisien, dan tidak korup demi menunjang pesatnya pertumbuhan ekonomi di negaranya. Pemerintah berperan penting dalam memberikan stimulus atau dorongan akan kegiatan ekonomi. Memberikan kebebasan kepada para wiraswasta, menetapkan kebijakan dan fiskal yang efektif, penyediaan fasilitas modal overhead tepat pada waktunya dapat dilakukan pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga harus memberikan jasa-jasa yang diperlukan masyarakat guna menunjang pertumbuhan perekonomian, seperti ketertiban, keadilan keamanan dan pertahanan, imbalan yang sepadan dengan kemampuan, penerapan dalam produksi, jaminan dalam menikmati harta kekayaan, hak-hak akan warisan, jaminan bahwa kesepakatan dan perjanjian bisnis dipegang teguh, pengaturan standar takaran, ukuran, dan mata uang serta kestabilan sistem pemerintah juga harus dapat menstimulus adanya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional	Tingkat pendapatan daerah dibandingkan tingkat pendapatan nasional	
	Tinggi ($Y_i > Y$)	Rendah ($Y_i < Y$)

Tinggi ($R_i > r$)	Daerah makmur (cepat maju dan cepat tumbuh)	Daerah tertekan (dalam proses membangun)
Rendah ($R_i < r$)	Daerah makmur (yang sedang menurun)	Daerah tertekan

Sumber: Arsyad (2010)

Keterangan:

R_i: laju pertumbuhan pdb di provinsi i

Y_i: pendapatan perkapita propinsi i

r: laju pertumbuhan pdb

Y: pendapatan perkapita rata-rata

2. Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah dan Penyaluran Dana ZIS

Rahardja dan Manurung menyatakan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDB. Nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut mereka PDB dipengaruhi oleh beberapa jenis pengeluaran agregat yaitu: (1) konsumsi rumah tangga; (2) Konsumsi pemerintah; (3) Investasi; (4) Ekspor netto.¹³ Berdasarkan pendapat Rosyidi perhitungan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nilai pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian atau menjumlahkan pengeluaran dari masyarakat ke dalam

¹³ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, hlm. 234.

barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Di Indonesia terdapat 5 Jenis pengeluaran dalam perekonomian antara lain: (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga; (2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) Perubahan Inventori; (5) Ekspor netto.¹⁴

Menurut Arsyad, Pertumbuhan ekonomi dihitung dari pendekatan dari segi pengeluaran, pendekatan segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, konsumsi swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDB.¹⁵ Menurut Sukirno yang berjudul makroekonomi menyatakan bahwa analisis tentang penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah berhasil di capai oleh suatu negara bisa dilihat dari tingkat PDB, dan PDB sisi pengeluaran dipengaruhi oleh empat komponen utama yaitu; (1) Konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran pemerintah, (3) investasi, dan (4) ekspor net (ekspor-impor). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu ditingkatkan permintaan konsumsi, pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, dan permintaan ekspor maupun impor.¹⁶

¹⁴ Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekata kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 106

¹⁵ Lincolyn Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima*, (yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 21.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* .hlm 37.

Dalam perspektif perekonomian islam, terdapat faktor yang bisa menyebabkan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu penyaluran dana ZIS. Penyaluran dana ZIS dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Menurut Riyandono, di dalam agama islam seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, zakat tersebut memiliki fungsi untuk menjadikan harta seseorang supaya menjadi produktif dan selalu berputar.¹⁷ Ketika harta tersebut produktif maka akan berdampak pada peningkatan output, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana ZIS tidak hanya digunakan untuk konsumsi, namun penyaluran dana ZIS dapat dikembangkan menjadi modal kerja yang bisa digunakan untuk modal kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ghofar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi dari segi konvensional, dalam perspektif ekonomi islam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh penyaluran dana ZIS. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, caranya adalah dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai satu nisab kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁸ Dilihat dari perspektif ekonomi makro, zakat dimanfaatkan untuk meningkatkan permintaan agregat karena pengeluaran besar mustahik. Dengan demikian, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong investasi ini juga

¹⁷ Riyandono, Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hlm. 54.

¹⁸ Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010).

merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan pada tingkat pemenuhan kebutuhan primer.¹⁹

3. Produk Domestik Bruto

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu dan menurut teori dari para ahli, Salah sat cara untuk melihat kemajuan perekonomian dan perkembangan sektor adalah mencermati nilai pertumbuhan PDB. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDB konstan digunakan untuk mengetahui sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.²⁰ PDB merupakan penjumlahan semua barang dan jasa akhir atau

¹⁹ Sarah Hasanah Qoyyim. 2020. Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. 1(2). Hlm. 55.

²⁰ Statistik Bank Indonesia, Metadata Sekda Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun).

Dalam hitungan PDB seluruh lapisan usaha dibagi menjadi 9 sektor, yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa. Pembangunan semua sektor di tempuh berdasarkan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang tujuan fungsionalnya menyajikan prioritas pembangunan, mengidentifikasi sasaran pada masing-masing sektor, pengalokasian dana sesuai pada penekanan sektor tertentu, penentu biaya, serta menentukan tolak ukur keberhasilan dan pelaksanaan.

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan beberapa cara antara lain:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor atau kegiatan yang produksinya

diakses melalui http://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sekda/Documents/8_PDRB_SEKDA_v2.pdf pada tanggal 12 April 2021, pukul 08:32 WIB.

berbentuk fisik atau barang, seperti pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara, yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

2) Pendekatan pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlah semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan.

3) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan atau produksi barang dan jasa itu digunakan untuk: (a) Konsumsi RT; (b) Konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung; (c) Konsumsi pemerintah; (d) Pembentukan modal tetap (investasi); (e) Perubahan stok; (f) Ekspor neto.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada penghitungan nilai total produksi dengan menggunakan pendekatan pengeluaran.

²¹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 24-25.

4. Konsumsi rumah tangga

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Michael konsumsi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²² Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder. Menurut Todaro, konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia.²³ Konsumsi sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa untuk konsumen akhir atau dibutuhkan oleh seseorang atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pekerjaan tersebut.

Sukirno menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga berarti seluruh nilai pengeluaran yang digunakan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhan dalam hidupnya dalam satu tahun tertentu, pengeluaran yang digunakan oleh rumah tangga diperoleh dari pendapatan yang diterima dan digunakan untuk membeli barang dan jasa.²⁴ Dalam Badan pusat statistik disebutkan bahwa pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga

²² Michale James, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Ghalia, 2001), hlm. 49.

²³ Todaro, *Ekonomi Dalam Pandangan Modern*. Terjemahan, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), hlm. 213.

²⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi teori dan praktik...*, hlm 38.

adalah pengeluaran atau pembelanjaan atas barang maupun jasa oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Fungsi rumah tangga dalam fenomena ini adalah sebagai pengguna terakhir (*Final Demand*) atas barang dan jasa yang diproduksi serta tersedia di suatu perekonomian.²⁵

Definisi konsumsi menurut Rosyidi diartikan sebagai penggunaan atas barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung. Pembelanjaan konsumsi pribadi adalah pengeluaran atas konsumsi yang diperbuat oleh rumah tangga atas barang-barang maupun jasa-jasa akhir.²⁶ Halim dalam bukunya menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran yang diperbuat oleh suatu rumah tangga dalam negara untuk membeli barang maupun jasa dengan tujuan mencukupi kebutuhannya sehari-hari pada kurun waktu tertentu.²⁷

Analisis makro ekonomi menghitung konsumsi dengan berdasarkan pada konsumsi rumah tangga karena beberapa alasan yaitu, yang pertama adalah konsumsi rumah tangga telah menyumbangkan kontribusi yang besar untuk pemasukan pendapatan nasional. Alasan yang kedua karena besarnya konsumsi yang dilakukan berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat, sehingga ketika pendapatan seseorang semakin besar maka akan semakin besar pula konsumsi seseorang yang dikeluarkan. Hal ini yang menjadi pengaruh terhadap fluktuasi kegiatan perekonomian negara.²⁸

²⁵ Sirusa.bps.go.id

²⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 163.

²⁷ Muhammad Abdul Halim, *Teori Ekonomika edisi 1*, (Jakarta: Jelajah Nusantara, 2018) hlm. 47.

²⁸ Sudirman dan M. Alhudori. 2018. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1). hlm. 86.

Teori konsumsi dari Keynes berfokus pada analisis statistik, dan membuat hipotesis berdasarkan pengamatan kausal. Menurut Keynes perhitungan perubahan angka perekonomian negara dapat dihitung berdasarkan pada besar konsumsi rumah tangga dan besar pendapatan rumah tangga. Dalam konsumsi rumah tangga, selalu terdapat pengeluaran untuk konsumsi sekalipun seseorang tidak mempunyai pendapatan, fenomena ini disebut sebagai pengeluaran konsumsi otonomus. Keynes dalam penelitiannya telah melakukan perbandingan antara tingkat pendapatan tertentu dan pengeluaran konsumsi dengan kecenderungan konsumsi. Ketika kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi tinggi, maka pendapatan akan dihabiskan untuk konsumsi, jika kecenderungan mengkonsumsi seseorang rendah, maka akan sedikit pendapatan masyarakat yang akan belanjakan untuk konsumsi.²⁹

Fungsi konsumsi digunakan untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan dan pengeluaran konsumsi, rumus fungsi konsumsi adalah berikut:³⁰

$$C = a + bY$$

dimana “C” merupakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, “a” merupakan besarnya konsumsi dimana “a” tidak tergantung pada besar pendapatan yang diperoleh atau konsumsi apabila tidak mempunyai pendapatan, “b” adalah marginal seseorang untuk bisa melakukan konsumsi, “Y” merupakan pendapatan disposable (pendapatan setelah dikurangi dengan pajak yang siap dikonsumsi) $a > 0$ dan $0 < b < 1$.

²⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi teori dan praktik...*, hlm 86.

³⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 36.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah faktor ekonomi yang terdiri dari: (1) Pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan disposebel. Pendapatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat konsumsi. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat konsumsi akan tinggi. Ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar; (2) Kekayaan rumah tangga. Kekayaan rumah tangga ini yang dimaksudkan adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan finansial. Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi karena menambah pendapatan disposebel; (3) Tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan untuk melakukan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal; (4) Perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga mempunyai perkiraan masa depannya semakin baik, mereka akan merasa lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karena pengeluaran konsumsi cenderung akan meningkat dan sebaliknya.

Faktor yang mempengaruhi konsumsi yang kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari: (1) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah; (2) Komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi diantaranya: usia, pendidikan, dan wilayah tinggal.³¹

³¹ Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hlm. 158

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga adalah Faktor non ekonomi. Faktor yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial-budaya masyarakat. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat.³² Ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan.

Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu, pertama penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan yang diterima pada periode tersebut, semakin tinggi pendapatan akan meningkatkan perbelanjaan rumah tangga. Kedua, apabila pendapatan meningkat, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat tetapi pada jumlah yang lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Ketiga, walaupun seseorang atau suatu keluarga tidak mempunyai pendapatan, mereka masih tetap melakukan perbelanjaan konsumsi. Mereka perlu makan, membayar sewa rumah dan membeli pakaian. Konsumsi seperti ini bisa dibiayai dari berbagai sumber, yakni: meminjam ke sanak saudara, menggunakan tabungan masa lalu atau menjual kekayaan.

Tabel 2.2 Klasifikasi Konsumsi Rumah Tangga

Interval Nilai	Klasifikasi
557.181,58-997.112,43	Rendah
997.122,44-397.043,28	Sedang

³² Ekawarna & Fachruddiansyah, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hlm. 160

1.397.043,29-4.481.264,64	Tinggi
---------------------------	--------

Sumber: Andriani & Nurhayati (2004)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi dalam tiga klasifikasi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada saat pengeluaran konsumsi rumah tangga berada di rentang nilai 557.181,58-997.112,43 miliar maka dapat dikatakan pengeluaran konsumsi rumah tangga rendah, sedangkan pada saat rentang nilai 997.122,44-397.043,28 miliar, dapat dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga sedang. Ketika nilai berada di antara 1.397.043,29-4.481.264,64 miliar, maka dapat dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga tinggi.

Konsumsi dalam islam didasarkan pada apa yang dibutuhkan manusia, atau berdasar kebutuhan. Sehingga tidak berlebihan. Hal ini didasarkan pada ayat *“...maka makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan...”* Ataupun ayat lain yang mementingkan keseimbangan. *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir...”* (Q.S. Al Furqan: 67), dan ayat lainnya *“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”* (QS Al Isra: 29)

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa konsumsi dalam pandangan islam lebih didasarkan pada kebutuhan atau need, dan tidak dilihat dari keinginan atau want, perbedaan ini tentunya meliputi perbedaan yang sifatnya hanya perbedaan sesaat atau hawa nafsu. Namun islam juga mencegah

sifat kikir dan pelit, sebagaimana digambarkan dalam al Quran bahwa perilaku kikir dekat dengan perilaku setan sebagaimana dilihat dari ayat yang terkait dengan perilaku hidup boros.³³

5. Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suindyah pengeluaran pemerintah diartikan sebagai gabungan dari produk yang telah dihasilkan yang di dalamnya berisi keputusan atau berbagai pilihan yang dibuat pemerintah yang digunakan untuk ketersediaan barang, jasa, dan pelayanan untuk masyarakat.³⁴ Sukirno juga menyatakan pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah.³⁵ Menurut Sukirno, pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai administrasi aktivitas pemerintah setiap hari dan sebagian yang lain digunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan negara, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, membiayai kesehatan rakyat, membiayai belanja angkatan bersenjata dan membiayai infrastruktur negara.³⁶

Dalam sebuah teori pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa PDB dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan timbal balik positif.

³³ Jenita dan Rustam, 2017, Konsep Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), hlm. 76.

³⁴ Suindyah, Sayekti. 2011. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ekuitas*, 15(4), hlm. 477-500.

³⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Jakarta Press, 2004), hlm. 25

³⁶ Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi: Teori dan Ilmu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada.

PDB merupakan seluruh nilai dari produksi barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh produsen pada suatu negara dalam satu waktu tertentu. PDB memiliki empat komponen penting salah satunya yaitu pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah adalah Semua pembelanjaan negara yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran, sehingga mengurangi ekuitas dana lancar, dan hal tersebut merupakan kewajiban negara dan tidak akan memperoleh pembayaran kembali. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan daerah.³⁷

Teori keyness menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dapat mendorong peningkatan permintaan barang maupun jasa yang telah diproduksi, sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi oleh karena itu pengeluaran pemerintah dilihat sebagai sebuah kekuatan eksogenus yang bisa mengubah pengeluaran agregat, atau bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai fungsi dari pengeluaran pemerintah. Sedangkan dalam hukum yang dinyatakan oleh Wagner, yaitu hukum ekspansi yang meningkat dalam kegiatan publik, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai sebuah determinan utama pertumbuhan dalam sektor publik yang berarti pembelanjaan pemerintah fungsi dari pertumbuhan ekonomi.³⁸

³⁷ Parluhutan Hutahaean. 2019. Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*. 3(2). hlm. 106.

³⁸ Parluhutan Hutahaean. 2019. Belanja Negara dan....., hlm. 106.

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Dalam jangka pendek, output dan kesempatan kerja negara bergantung pada permintaan agregat, sehingga kebijakan moneter dan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan mengurangi inflasi. Konsep Keynesian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap terciptanya pertumbuhan ekonomi. Karena tanpa pengawasan pemerintah, ekonomi pasar sulit untuk menjamin ketersediaan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan seringkali menimbulkan ketidakstabilan, ketimpangan dan ketidakefisienan yang tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi.³⁹

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Beberapa sektor perekonomian yang terpengaruh dalam pengeluaran pemerintah yakni:

a) Produksi

Pengeluaran negara, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai faktor produksi, karena pengeluaran pemerintah dapat menunjang tersedianya faktor-faktor produksi seperti, modal, tenaga kerja, dan manajemen. John Due menyebutkan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat GNP (*Gross National Product*) nyata

³⁹Christian Lendy Koyongian, Paulus Kindangen, George Kawung 2019. Pengaruh pengeluaran pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 18(7). hlm 5.

dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dipakai dalam produksi, melalui program-program pengeluaran.⁴⁰

b) Distribusi

Secara langsung atau tidak langsung pengeluaran negara berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Subsidi yang akan dikeluarkan pemerintah untuk barang atau jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi mudah untuk memperoleh barang dan jasa tertentu.

c) Konsumsi

Pengeluaran dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumen masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah maupun mekanisme pasar. Pemerintah akan mengalokasikan kembali sumber ekonomi dari berbagai barang atau jasa dengan memproduksi barang atau jasa yang mengandung keuntungan eksternal. Kegiatan ini mengubah alokasi sumber ekonomi karena masing-masing pemberi dan penerima mempunyai pola pengeluaran yang berlainan. Pajak yang dipakai untuk membiayai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan relokasi dari sumber ekonomi.

d) Keseimbangan perekonomian

Pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB. Kebijakan fiskalnya dapat berupa kebijakan surplus

⁴⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 212

anggaran, defisit anggaran, kompensasi, investasi umum tergantung pada situasi ekonomi yang dihadapi. John Due menyatakan bahwa program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian *full-employment* dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian, dan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Dalam penelitian Anggraini dan Cahyono, Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.⁴² Meskipun Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Rostow dan Musgrave mengembangkan teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, yang dibedakan antara lain: (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya; (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap

⁴¹ *Ibid*, hlm. 213

⁴² Siska Anggraini Putri dan Hendry Cahyono. 2012. Pengaruh Belanja Daerah dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*. 01(01), hlm. 2

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar; (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada banyak faktor yang penting, diantaranya jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2002 pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran belanja aparatur daerah dan belanja publik.⁴³ Belanja aparatur daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dimana dalam belanja operasi ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan yang kedua adalah pengeluaran belanja publik.

Sesuai dengan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dengan format belanja yang baru, anggaran belanja terdiri dari: (1) Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur negara sebagai suatu imbalan atas kinerja pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan

⁴³ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

dengan pembentukan modal; (2) Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis digunakan untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal digunakan untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta belanja modal fisik lainnya; (3) Pembayaran bunga utang, terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya; (4) Subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, dan untuk membantu BUMN melakukan tugas pelayanan umum; (5) Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada Negara atau organisasi; (6) Bantuan sosial, berupa bentuk cadangan untuk penanggulangan bencana alam; (7) Belanja lain-lain. Pemanfaatan belanja lain-lain adalah untuk menampung belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja diatas.⁴⁴

Tabel 2.3 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Interval	Klasifikasi
Semakin Meningkat	Baik
Semakin Menurun	Tidak baik

Sumber: Parluhutan Hutahaean. (2019)

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Keuangan Negara.*

6. Penyaluran Dana ZIS

a) Hakikat Penyaluran ZIS

Dalam Perekonomian berbasis syariah, Dana ZIS merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Penyaluran zakat merupakan pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.⁴⁵ Menurut Mufraini dalam bukunya inovasi penyaluran untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:⁴⁶

- 1) Penyaluran bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola penyalurannya dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

⁴⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169.

⁴⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 153-154.

- 2) Penyaluran bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
- 3) Penyaluran bersifat “produktif tradisional”, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Penyaluran dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Penyaluran dana zakat setidaknya-tidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini:⁴⁷ (1) Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga; (2) Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya; (3) Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa

⁴⁷ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116.

berpedoman kepada skala prioritas; (4) Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif; (5) Menyerahkan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ke tempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.

b) Zakat

Menurut bahasa dari pengertian Hafidhudin, zakat memiliki beberapa arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kesucian, dan keberesan.⁴⁸ Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta yang wajib dikeluarkan kepada yang berhak menurut perintah Allah. Mengutip pendapat dari Wahidi bahwa jumlah zakat yang diserahkan itu dapat memperbanyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan kita dari kebinasaan.⁴⁹ Menurut Abbas, zakat memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan, serta memberi pengaruh secara nyata pada kegiatan konsumsi masyarakat, zakat dapat pula berdampak pada pilihan seseorang dalam memanfaatkan pendapatannya untuk tabungan, investasi, atau konsumsi.⁵⁰

⁴⁸ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

⁴⁹ Nurul Huda et. al, *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset edisi Pertama*, (Yogyakarta: Prenamedia, 2015), hlm. 1

⁵⁰ Anwar Abbas, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2009), hlm. 88.

Allah SWT telah berbicara dengan tegas dalam menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S At-Taubah [9] ayat 60:⁵¹

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*”

Berikut adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zaka menurut QS At Taubah ayat 60:

- 1) Fakir. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁵² Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.⁵³
- 2) Miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan.⁵⁴ Termasuk golongan fakir/miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 280.

⁵³ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat.*, 86.

⁵⁴ Bidang Haji Zakat dan Wakaf, *Fiqh Zakat* 87.

lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, orang yang terkena musibah kehilangan harta benda, baik karena bencana alam atau hal lain, gelandangan, anak-anak terlantar dan lain sebagainya.⁵⁵

3) Panitia Zakat (*Al- 'Amil*). Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Tugas panitia zakat adalah mengambil zakat (*al- 'asyir*); penulis (*al-katib*); pembagi zakat untuk para mustahik; penjaga harta yang dikumpulkan; orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan (*al-hasyir*); orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat (*al- 'arif*); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala.⁵⁶

4) *Muallaf*. Kelompok *muallaf* terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

5) Budak (*Riqab*). Budak yang dimaksud jumbuh ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian)

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 108.

⁵⁶ Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.*, 282-283.

untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.⁵⁷

- 6) Orang yang berutang (*Al-Gharimin*). Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *Pertama*, orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya, untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau membiayai pendidikan anaknya. *Kedua*, orang yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, hutang karena mendamaikan dua pihak yang bertengkar, atau untuk menjalankan misi kemanusiaan (memenuhi kebutuhan suatu lembaga).⁵⁸
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). *Sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.⁵⁹ Dalam

⁵⁷ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen.*, 200.

⁵⁸ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen ...*, 206.

⁵⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Riski, 1999), hlm. 165.

perkembangannya, *sabilillah* dapat mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan.

- 8) Orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*). Yaitu musafir yang kehabisan bekal atau tiada perbekalan dalam perjalanan. Selama perjalanan dari negaranya mendatangkan kebaikan kepada Islam dan umatnya, serta bukan perjalanan maksiat. Termasuk anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya di tengah perjalanan (anak buangan).⁶⁰

c) *Infaq dan Shadaqah*

Infak berasal dari kata *anfaqa*, yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk suatu urusan atau kepentingan sesuatu. Pengertian infak termasuk dana yang dikeluarkan juga oleh orang kafir untuk urusan atau kepentingan agamanya.⁶¹ Menurut terminologi makna awal sedekah adalah menetapkan atau menancapkan sesuatu pada sesuatu. Sikap suka rela serta pengeluarannya tidak terikat pada syarat-syarat tertentu. Sedekah tidak terbatas pada sesuatu yang berbentuk materi

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 140.

⁶¹ Nurlina T Muhyiddin et. al, *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif Islam dan Konvensional*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), hlm. 167.

atau harta, tetapi juga jasa, yang dapat memberi manfaat untuk orang lain.⁶²

Berbeda dengan zakat yang penerimanya harus berasal dari delapan asnaf, *infaq* dan *shadaqah* boleh diberikan kepada siapapun. Namun, ada ketentuan orang yang paling berhak dan wajib didahulukan untuk menerima harta tersebut. Paling utama adalah wajib diberikan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 215:⁶³

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Menurut ayat tersebut, golongan yang berhak menerima infak adalah:⁶⁴ (1) Kedua orang tua, karena merekalah paling besar jasanya; (2) Para kerabat; (3) Anak-anak yatim; (4) Orang-orang miskin; (5) Dan orang-orang yang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal). Pemberian sedekah tidak terbatas pada materi/harta dan bisa dengan apapun sesuai kemampuan seseorang dan apapun yang dimilikinya. Misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, bisa dikategorikan sedekah. Selain itu, *shadaqah* kepada keluarga terdekat adalah yang paling utama.

⁶² Nurlina T Muhyiddin et. al, *Ekonomi Bisnis Menurut Prespektif* hlm 170.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 459.

d) Pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan *Shadaqah* berdasarkan UU No. 23

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut harus berasaskan pada: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus dikelola berdasarkan syariat Islam dan dapat dipercaya, serta untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusiannya dilakukan secara adil, dan memberi jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Adanya hierarki organisasi pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ, dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, yang dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.⁶⁵ Kepengurusan BAZNAS harus melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.⁶⁶ Untuk membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang

⁶⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

telah diaudit syariat dan keuangan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulan dan akhir tahun. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik.

Terkait pengelolaan zakat, pengumpulan zakat diatur dalam Pasal 21-Pasal 24 UU No. 23/2011. Pasal 21 mengatur tentang tata cara muzaki dalam membayarkan zakat. Baik itu menghitung sendiri kewajiban wajib zakat nya atau meminta bantuan organisasi pengelola zakat dalam menghitung. Kemudian di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, untuk kemudian bukti setoran zakat tersebut dapat dijadikan bukti sebagai pengurang penghasilan pajak. Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam hal penyaluran dana ZIS yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU No. 23/2011, zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian harus dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi (muzaki atau donatur) terlebih dahulu. Ketentuan mengenai bentuk penyaluran, maupun program-program pemberdayaan zakat tidak dijelaskan di dalam UU ini dan bersifat global.

Bahkan di dalam PP No. 14 Tahun 2014, tidak ada pasal yang membahas mengenai penyaluran zakat.

Pendayagunaan zakat diatur dalam Pasal 27 UU No. 23/2011. Dalam hal pendayagunaan, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Asalkan kebutuhan dasar mustahik yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan telah terpenuhi. Hal-hal yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akarvdari penunaian zakat, infak, dan sedekah adalah untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, sama seperti halnya tujuan dari *maqasid al-syari'ah*. ZIS merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial terhadap umat manusia. Oleh karena itu, maka dalam pengelolaan ZIS harus memperhatikan *maqashid al-syari'ah*. Terutama ketika melaksanakan penyaluran dana ZIS kepada mustahik dan masyarakat, sehingga merealisasikan kemaslahatan dan meminimalisir kejahatan di masyarakat.

Distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan umat Islam di dunia dan akhirat dapat terealisasi jika kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat.⁶⁷ Tujuan lain dari membayarkan ZIS adalah mampu merubah mustahik menjadi muzaki. Setelah kebutuhan pokok mustahik terpenuhi, dana ZIS dapat digunakan untuk membentuk suatu usaha. Misalkan, disalurkan untuk tujuan produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan secara terus menerus oleh mustahik, digunakan sebagai modal usaha, pelatihan *entrepreneurship* (kewirausahaan), pengadaan alat kerja, pengadaan fasilitas kesehatan, serta membiayai pendidikan.

Jadi, jelaslah bahwa dana ZIS sangat berguna untuk memberdayakan rumah tangga miskin, terlebih jika hal tersebut dikelola oleh lembaga. Antara lain, mengubah masyarakat dari kemiskinan kepada hidup yang berkecukupan, dari kebodohan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban, dari keterbelakangan kepada kemajuan dan modernisasi, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.⁶⁸

Potensi ZIS di Indonesia cukup besar mengingat sebagian masyarakat

⁶⁷ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prinsip Maqashid Al Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 140.

⁶⁸ Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 48.

Indonesia adalah muslim, Oleh sebab itu, ZIS dapat bermanfaat sebagai sumber pendapatan atau dana sosial ekonomi untuk umat. Lebih jauh, tujuan dari dana ZIS tidak hanya untuk menyantuni orang yang kurang mampu secara konsumtif, tetapi terdapat tujuan lain yang lebih dalam, yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran negara.

Tabel 2.4 Klasifikasi Penyaluran Dana ZIS

Interval	Klasifikasi
Semakin Meningkat	Baik
Semakin Menurun	Tidak baik

Sumber: Arief Mufraini, (2012)

A. Penelitian Terdahulu

1. Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Nurhuda et al, dalam studinya yang bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, konsumsi, pendapatan disposebel, dan suku bunga di Provinsi Sumatera Barat, serta menganalisis pengaruh konsumsi, kapital dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah analisis model persamaan simultan dengan metode Two Stages Least Square (TLS). Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi, konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposebel, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi di Sumatra Barat. Akan tetapi secara parsial tingkat suku bunga tidak berpengaruh kepada konsumsi. 2) konsumsi, kapital dan tenaga

kerja baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sumatra barat.⁶⁹ Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pada variabelnya, peneliti saat ini menggunakan variabel konsumsi, pengeluaran pemerintah serta penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi, selain itu metode yang digunakan penelitian saat ini adalah analisis VAR.

Pengamatan yang dilakukan oleh Zainuddin et. al, yang bertujuan untuk menganalisis struktur pengeluaran konsumsi rumah tangga dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran pangan di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat analisisnya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Jawa Timur dengan adanya jumlah pengeluaran untuk non makanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga di Jawa Timur antara lain PDRB perkapita, harga beras, tingkat inflasi, dan pengeluaran non pangan. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terletak pada variabel dan alat analisis yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda.⁷⁰

⁶⁹ Nurhuda, Sri Ulfa Sentosa, Idris. 2013. Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 2(3).

⁷⁰ Ahmad Zainuddin, Ratih Apri Utami, Nurul Dwi Novikarumsari. 2020. Analisis Determinan Tingkat Pengeluaran Konsumsi Pangan di Jawa Timur, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 13(1).

Penelitian Sudirman dan Alhudori, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari konsumsi rumah tangga dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana data yang diteliti adalah data yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, data dalam penelitian ini adalah time series dengan kurun waktu 2005-2015 dengan metode analisis regresi linier berganda hasil penelitian pada Pengujian hipotesis konsumsi rumah tangga dan investasi terdapat hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disesuaikan dengan teori ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh investasi maka hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan uji-F serta uji-t dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka nilai F-tabel adalah 4,07 sedangkan F hitung adalah 9,422. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.⁷¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel yang diteliti dan metode penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakib yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu variabel konsumsi rumah tangga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita

⁷¹ Sudirman dan M. Alhudori. 2018. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1).

di Sulawesi Selatan. variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB Per Kapita di Sulawesi Selatan. Berdasarkan analisis variabel dominan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah variabel konsumsi rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari nilai beta 1,002 yang lebih besar dari nilai beta lainnya.⁷² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada metode penelitian saat ini yang menggunakan uji kausalitas analisis VAR, variabel yang digunakan, serta lokus penelitian.

Pengamatan yang dilakukan oleh Afifah et. al, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukkan: Variabel pengeluaran konsumsi pemerintah secara parsial, memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988-2017. Variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga secara parsial, memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988-2017. Variabel pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara

⁷² Andi Hakib. 2019. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*. 15(1).

bersama-sama, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988-2017.⁷³

2. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Novela dan Aimon dalam penelitiannya yang bertujuan menganalisis hubungan kausal pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Barat. Metode penelitian ini menggunakan uji analisis kausalitas granger dengan data panel. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah sementara pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi pertumbuhan (2) pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia memiliki hubungan satu arah dimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dan kualitas sumberdaya manusia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (3) pengeluaran pemerintah dan kualitas sumber daya manusia tidak memiliki hubungan satu arah maupun dua arah (kausalitas) dimana pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi kualitas sumber daya manusia begitu juga dengan kualitas sumber daya manusia tidak memengaruhi pengeluaran pemerintah selama periode penelitian..⁷⁴

⁷³ Ari Tri Afiftah, Whinarko Juliprijanto, Rian Destiningsih. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1988-2017. *Journal of Economic*. 1(2).

⁷⁴ Hanifa Novela dan Hasdi Aimon. 2019. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 1(1).

Pengamatan yang dilakukan oleh Santi et. al, dengan tujuan untuk menentukan arah kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB, tenaga kerja dan PDRB. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan data panel SWP Jember dan sekitarnya selama 2000-2014. Uji kausalitas Granger digunakan untuk mengidentifikasi arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB, tenaga kerja dan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas antar variabel yaitu pengeluaran pemerintah dan PDRB, investasi dan PDRB, tenaga kerja dan PDRB.⁷⁵

Brillianta et. al, dalam pengamatannya yang bertujuan mengetahui bagaimana kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi periode 2007-2016 dengan menggunakan data panel. Metode pendekatan yang dilakukan adalah kuantitatif dengan analisis model granger causality. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan dua arah dari 10 provinsi di Sumatera. Namun terdapat satu arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut ditemukan di Provinsi Barat Provinsi Sumatera dan Bengkulu. Sedangkan 8 provinsi lainnya, tidak memiliki kausalitas satu arah dan dua arah hubungan.⁷⁶

⁷⁵ Nindya Eka Santi, Aisyah Jumiarti, Fivien Muslihatinningsih. 2018. Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 5(1).

⁷⁶Nadin Brillianta et. al. 2017. Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15 (1)

Penelitian yang dilakukan oleh Hutahaean dengan tujuan untuk melihat kointegrasi dan kausalitas antara belanja negara dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menerapkan lima analisis metode ekonometri untuk menemukan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat satu jalan hubungan kausalitas dari PDB dengan harga konstan ke pengeluaran kementerian Lini, pengeluaran kementerian non-lini, serta pengeluaran transfer regional. Pada penelitian ini pengeluaran kementerian lini berpengaruh positif signifikan terhadap PDB pada harga konstan di jangka panjang.⁷⁷

Linda dalam pengamatannya yang bertujuan untuk melihat kausalitas dan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode Cointegrasi Test dan Granger Causality test dengan menggunakan software Eviews 9. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Hasil dari uji kointegrasi menunjukkan bahwa diantara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Hasil uji kausalitas granger diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan timbal balik antara pengeluaran

⁷⁷ Parluhutan Hutahaean. 2019. Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas, *Jurnal KajianvEkonomi Keuangan*. 2(3).

pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tetapi yang terjadi hanyalah hubungan searah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran pemerintah baik langsung maupun tidak langsung.⁷⁸

3. Penyaluran Dana ZIS dan Pertumbuhan Ekonomi

Tambunan et. al, dalam pengamatannya yang bertujuan untuk menganalisis tentang ada atau tidak hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel zakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2015-2018. Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi yang merupakan salah satu uji dari metode VAR VECM untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Data yang digunakan menggunakan data time series tahun 2015-2018 dengan data yang diinterpolasi ke data periode bulanan. Hasil menunjukkan bahwa zakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia et. al, tujuan untuk menganalisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel zakat, pembiayaan bank syariah dan PDB terhadap IPM. Metode yang digunakan adalah path analysis yang bertujuan untuk mengkaji hipotesis hubungan sebab akibat. Hasil yang didapat adalah hubungan langsung pembiayaan bank syariah dan PDB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

⁷⁸ Roza Linda. 2016. Kausalitas dan Kointegrasi Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun Waktu 1983-2014, *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*. 19(2).

⁷⁹ Khairina Tambuna, Isnaini Harahap, Marliyah, 2019. Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018, *Jurnal Akuntansi Syariah*. 2 (2). Hlm. 249-264

Variabel zakat dan pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap PDB. Nilai koefisien yang paling besar diantara hubungan langsung adalah koefisien pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap PDB yaitu sebesar 81.7%. Namun hubungan langsung zakat terhadap IPM tidak dapat diketahui. Sedangkan hubungan tidak langsung menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel zakat terhadap IPM melalui PDB dan terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan bank syariah terhadap IPM melalui PDB.⁸⁰

Pengamatan dari Qoyyim dan Widulung yang bertujuan untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2015-2019.⁸¹ Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana ZIS memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara simultan keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Purwanti dalam studinya yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

⁸⁰ Rika Yulita Amalia, Syifa Fauziah, Indah Wahyuningsih. 2019. Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, *Jurnal Ekonomi AL-MUZARA'AH*. 7(1)

⁸¹ Sarah Hasanah Qoyyim dan Sisca Debyola Widuhung, 2020. Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2).

Indonesia. Penelitian ini berjenis Kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis regresi panel dengan driscoll dan kesalahan standar kraay. Hasil dari penelitian ini adalah zakat, infak, dan sedekah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁸²

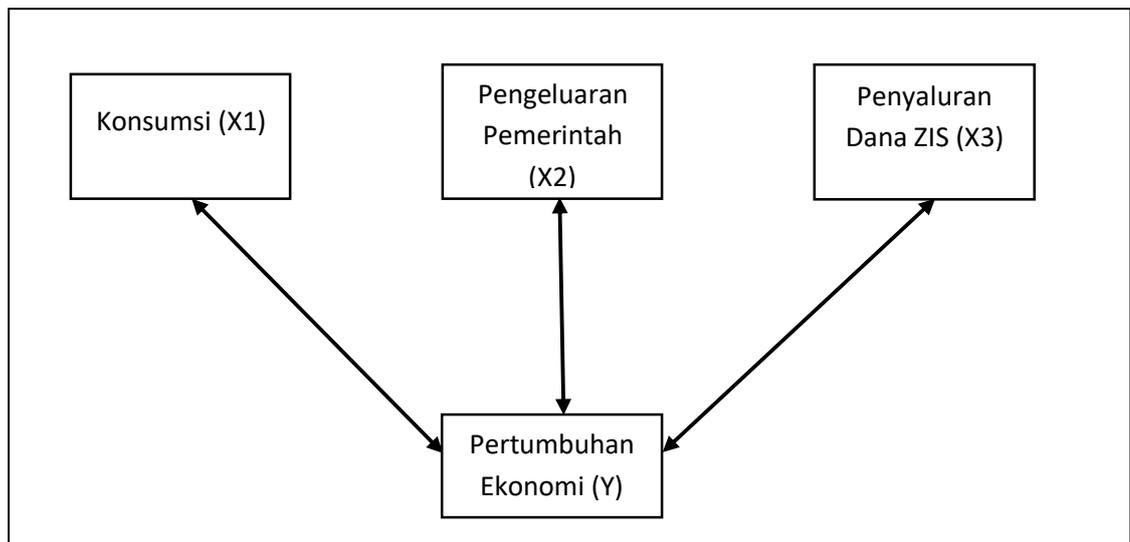
Anggraini et. al, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana ZIS dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data dalam penelitian ini sekunder diambil dari BAZNAZ dan tingkat inflasi dari BI, dengan data bulanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan tingkat inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dana ZIS dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2011-2015.⁸³

⁸² Dewi Purwanti. 2020. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(01)

⁸³ Rachmasari Anggraini, Ryval Ababil, Tika Widiastuti. 2018. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(2).

B. Kerangka konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Kausalitas X1 terhadap Y didasarkan pada teori Sadono sukirno⁸⁴ dan penelitian terdahulu Nurhuda et al⁸⁵, Zainuddin et. al⁸⁶, Sudirman dan M. Alhudori⁸⁷, Andi Hakib⁸⁸, Afiftah et. al⁸⁹.

⁸⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 37.

⁸⁵ Nurhuda, Sri Ulfa Sentosa, Idris. 2013. Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 2(3).

⁸⁶ Ahmad Zainuddin, Ratih Apri Utami, Nurul Dwi Novikarumsari. 2020. Analisis Determinan Tingkat Pengeluaran Konsumsi Pangan di Jawa Timur, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 13(1).

⁸⁷ Sudirman dan M. Alhudori. 2018. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 2(1).

⁸⁸ Andi Hakib. 2019. Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016. *Jurnal Ekonomi*. 15(1).

⁸⁹ Ari Tri Afiftah, Whinarko Juliprijanto, Rian Destiningsih. 2018. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1988-2017. *Journal of Economic*. 1(2).

2. Kausalitas X2 terhadap Y didasarkan pada teori Sadono sukirno⁹⁰ dan penelitian terdahulu Hanifa Novela⁹¹, Santi et. al⁹², Nadin Brillianta et. al⁹³, Parluhutan Hutahaean⁹⁴, Roza Linda⁹⁵.
3. Kausalitas X3 terhadap Y didasarkan pada teori Riyandono⁹⁶ dan penelitian terdahulu Tambunan et. al⁹⁷, Amalia et. al⁹⁸, Qoyyim dan Widulung⁹⁹, Dewi Purwanti¹⁰⁰, Anggraini et. al¹⁰¹.

⁹⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar....*, hlm. 37

⁹¹ Hanifa Novela dan Hasdi Aimon. 2019. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*. 1(1).

⁹² Nindya Eka Santi, Aisyah Jumiarti, Fivien Muslihatinningsih. 2018. Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto SWP Jember dan Sekitarnya. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 5(1).

⁹³ Nadin Brillianta et. al. 2017. Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 15 (1)

⁹⁴ Parluhutan Hutahaean. 2019. Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas, *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*. 2(3).

⁹⁵ Roza Linda. 2016. Kausalitas dan Kointegrasi Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun Waktu 1983-2014, *Jurnal Penelitian sosial keagamaan*. 19(2).

⁹⁶ Riyandono, Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hlm. 54.

⁹⁷Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, Marliyah, 2019. Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018, *Jurnal Akuntansi Syariah*. 2 (2). Hlm. 249-264.

⁹⁸ Rika Yulita Amalia, Syifa Fauziah, Indah Wahyuningsih. 2019. Pengaruh Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, *Jurnal Ekonomi AL-MUZARA'AH*. 7(1).

⁹⁹ Sarah Hasanah Qoyyim dan Sisca Debyola Widuhung, 2020. Analisis Strategi Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2).

¹⁰⁰ Dewi Purwanti. 2020. Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 6(01).

¹⁰¹ Rachmasari Anggraini, Ryval Ababil, Tika Widiastuti. 2018. Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(2).